



David Efendi, dkk

DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia

Pengantar:
Bambang Eka Cahya Widodo
Tunjung Sulaksono



Published by
SAMUDRA BIRU

DEMOKRASI DAN *CIVIL SOCIETY*

**Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia**

Published by
SAMUDRA BIRU

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

PUBLISIRTAH
SAMPUR BIRU

DEMOKRASI DAN *CIVIL SOCIETY*

**Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia**

David Efendi, dkk.

Editor:

David Efendi
Sanny Nofrima

Pengantar:

Bambang Eka Cahya Widodo
Dr. Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si.



Published by
SAMUDRA BIRU

DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia

©. David Efendi, dkk.

xxiv + 572 halaman; 15,5 x 23 cm.

ISBN: 978-623-261-440-6

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Juni 2022

Penulis : David Efendi, dkk.

Editor : David Efendi
Sanny Nofrima

Sampul : Bagus Satrio

Layout : Bagus Satrio

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

Published by
SAMUDRA BIRU

PRAKATA EDITOR

Sebagai penguatan tradisi intelektual publik, di Prodi Ilmu Pemerintahan kami secara rutin setiap semester mengundang penulis dari beragam latar belakang untuk bergabung dalam proyek penulisan buku. Seri buku ini adalah yang keempat selama pandemik Covid-19 berlangsung. Kami sebagai editor yang ditunjuk prodi merasa sangat senang dan menikmati kerenyahan beragam tulisan dari beragam generasi dan asal universitas. Dalam *book chapter* yang kami edit kami menemukan payung setidaknya tercermin dalam judul buku dan pembagian bab di dalamnya. Semoga ini ikhtiar terbaik kita semua untuk mengapresiasi beragam tema dan karya yang dikirim kontributor. Beberapa catatan editor secara singkat sebagai berikut.

Dalam bab pertama yang diberikan judul *Governance*, Krisis, dan Inovasi di Masa Pandemi Covid-19 memuat sembilan artikel yang sebagian disatukan oleh gagasan tentang tata kelola atau kolaborasi dan beragam model inovasi serta sebagian ditulis dalam konteks respon atas krisis yang terjadi baik bencana alam atau bencana pandemi yang sejatinya tak dapat dipisahkan dari kondisi ekologi secara holistik.

Bab kedua disematkan judul Politik Elektoral di Masa Pandemi Covid-19 memuat dua tulisan yang sangat monumental perihal praktik demokrasi elektoral dan evaluasi kepemiluan yang terdiri dari tulisan Bambang Eka dan Edward Trias P. yang mengoreksi praktik desa anti-politik uang perspektif netizen dengan mendayagunakan kecanggihan mesin pelacak opini media. Sementara Ridho Al-Hamdi dan Sakir menganalisis faktor penyebab suara tidak sah dalam pilkada serentak di era pandemi khususnya di Kabupaten Sleman.

Bab ketiga yang menghadirkan lima buah tulisan ini dikerangkai dalam judul bab Demokrasi dan Gender di Masa

Pandemi Covid-19. Demokrasi yang dibaca secara langsung dan menggunakan mesin digital atau mengobservasi keragaman dinamika demokrasi di ruang-ruang *cyber politics*, juga pembacaan dalam konteks politik lokal di era desentralisasi sangat menarik karena keragaman situasi politik lokal. Terakhir adalah Bab 4 yang terdiri dari tujuh artikel yang mendiskusikan peran masyarakat sipil, kekuatan-kekuatan demokratis, dan arus informasi komunikasi di saat pandemi yang mengisyaratkan bahwa diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas kekuatan, dan gagasan demokratisasi informasi untuk mendapatkan ketangguhan masyarakat dan tata pemerintahan yang partisipatif.

Dari total naskah yang masuk kami berusaha mengakomodir sebagai apresiasi dan apabila dalam penyuntingan, *editing*, terdapat kurang dan salah mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih kepada penulis dan prodi Ilmu Pemerintahan UMY yang memungkinkan buku ini dapat hadir di tengah-tengah kita semua.

Yogyakarta, 10 Maret 2022

Tim Editor

Published by
SAMUDRA BIRU

KATA PENGANTAR

DEMOKRASI DAN *CIVIL SOCIETY* KEBANGKITAN POLITIK MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA DI TENGAH KEMUNDURAN DEMOKRASI

Politik masyarakat sipil, sempat terpinggirkan dalam kajian ilmu politik dan pemerintahan yang cenderung berfokus pada ranah masyarakat politik dan domain kekuasaan. Menguatkan kajian ekonomi politik, mendorong kajian-kajian ilmu politik dan pemerintahan bergeser ke domain masyarakat ekonomi dan dinamika kekuasaan yang mengikutinya. Berabad-abad kemudian negara dan masyarakat sipil kurang mendapat perhatian, bahkan kajian tentang masyarakat sipil sering dianggap sebagai kajian pinggiran dari ilmu politik dan pemerintahan. Namun begitu seiring dengan merosotnya kualitas demokrasi kita, seiring dengan kemunduran demokrasi yang sedang kita alami, para ilmuwan politik mulai melirik kembali peran *civil society* dalam mendukung dan mempertahankan demokrasi.

Kekhawatiran akan gagalnya demokrasi dan kemunduran demokrasi, membuat kajian tentang *civil society* kembali mendapat perhatian. Keterlibatan masyarakat sipil seolah menjadi pe-nawar terhadap persoalan kemunduran demokrasi ketika instrumen demokrasi lainnya mengalami kemerosotan peran yang signifikan. Partai Politik yang dikuasai oleh para oligarki, Parlemen yang semakin tidak bisa dipercaya, Pemerintah yang korup, Pers yang gagal berfungsi sebagai penyeimbang, dan sistem pengadilan yang juga kehilangan kepercayaan publik seolah menempatkan *civil society* sebagai pilar terakhir yang mempertahankan bangunan demokrasi dari kerusakan total.

Organisasi masyarakat sipil yang bercirikan voluntarisme dan egalitarianisme, merupakan tempat yang paling potensial untuk menyemai benih demokrasi. Kehadiran organisasi masyarakat sipil dalam tata kelola pemerintahan merupakan sebuah kebutuhan, terutama untuk mencegah dan menutupi kegagalan negara maupun kegagalan pasar dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Di negara demokrasi baru seperti Indonesia, kewarganegaraan yang rapuh, institusi yang lemah, korupsi merajalela, dan warga negara yang merasa tidak berdaya adalah realitas politik saat ini. Membicarakan masyarakat sipil pada dasarnya adalah memperkuat politik kewarganegaraan, dengan harapan mendorong pemberdayaan masyarakat sipil terutama di hadapan negara dan pemilik modal. Persoalannya adalah apakah ada alternatif untuk kegagalan politik dan keterpisahan warga negara dari urusan publik? Tentu jawabannya tidak dan hampir mustahil memisahkan warga negara dari urusan publik.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan termasuk Indonesia menyajikan banyak fakta ketidakberdayaan negara dan kegagalan politik dalam menangani berbagai persoalan yang timbul, sejak pelayanan kesehatan, vaksin, maupun dalam pengendalian pandemi dalam hal ini pemberlakuan karantina atau pembatasan sosial. Di sisi yang lain para pengusaha yang berada pada domain masyarakat ekonomi, sibuk mengejar keuntungan berlimpah yang ditimbulkan dari ketakutan dan horor yang timbul akibat penanganan pandemi yang kacau balau.

Masyarakat sipil adalah sebuah hubungan dan kegiatan yang membentuk hidup kita, hal-hal yang kita lakukan sebagai warga sipil, secara bebas dan sukarela, dalam hubungan dengan orang lain, di luar negara dan pasar. Kesejahteraan sosial sangat ditentukan dalam dan melalui hubungan kita di masyarakat sipil. Pengalaman perawatan dan kepemilikan kita dibentuk oleh hubungan-hubungan ini. Selama lebih dari seabad, gerakan politik, pemerintah, dan kebijakan publik telah memfokuskan hampir secara eksklusif pada negara dan pasar, dan mengabaikan masyarakat sipil. Hubungan masyarakat sipil bersifat horizontal,

relasional, dan sukarela. Interaksi warga dengan negara bersifat vertikal dan koersif. Interaksi bisnis-pelanggan adalah pertukaran moneter (transaksional). Ketika gerakan politik, pemerintah, dan kebijakan publik memusatkan perhatian secara eksklusif pada negara dan pasar, mereka hanya berfokus pada negara-warga negara dan modal.

Bagaimana masyarakat sipil tertinggal dalam kajian politik? Kajian politik awalnya secara eksklusif berfokus pada negara dan pasar. Sektor publik atau sektor swasta sebagai solusi untuk setiap masalah. Kemudian perhatian para ilmuwan bergeser, melihat hanya individu dan pemerintah sebagai aktor sosial. Tidak dapat melihat asosiasi warga dan interaksinya dan tidak melihat individualisme dan kolektivisme sebagai sisi lain dari koin yang sama. Pada tahap selanjutnya politik menjadi persoalan publik dan sektor swasta. Mengabaikan sektor ketiga (rumah tangga, asosiasi, klub, badan amal, perusahaan sosial, koperasi). Mengabaikan keluarga dan usaha kecil serta wiraswasta (sektor yang luas dan terus berkembang tetapi yang tidak sesuai dengan tujuan manajemen). Yang berkembang kemudian adalah politik sebagai 'manajemen', pelaksanaan yang bersifat *top-down* dan administrasi gaya perusahaan. Partai politik sebagai instrumen manajemen mereka, berdasarkan budaya *top-down*, perintah-dan-kontrol. Partai-partai ini tidak lagi membutuhkan warga negara, dan sekarang terdiri dari operasi profesional, 'politisi karier', 'kelas politik'.

Politik masyarakat sipil pada dasarnya adalah merespons marginalisasi masyarakat sipil dari arena politik. Merespons tidak terwakilinya (representasi) masyarakat sipil dalam proses pembuatan keputusan. Merespons terhadap pengucilan masyarakat sipil dari pembuatan kebijakan publik. Politik masyarakat sipil pada prinsipnya adalah mencari dan menemukan representasi masyarakat sipil dalam politik. Politik masyarakat sipil pada prinsipnya adalah pembuatan kebijakan publik yang memperkuat posisi masyarakat sipil. Politik masyarakat sipil pada dasarnya adalah transfer kekuasaan dari negara dan pasar kepada

masyarakat sipil. Dengan demikian maka politik masyarakat sipil pada dasarnya adalah pembaruan demokrasi yang menempatkan warga negara dan masyarakat sipil di pusat proses politik. Pembaruan demokrasi masyarakat sipil itu ditandai tiga fitur utama yang penting yakni relasional, asosiasi formal maupun informal, dan sukarela (*volunterism*).

Aktivitas utama masyarakat sipil pada dasarnya dapat digolongkan dalam 10 kategori yang mungkin sangat luas variasinya yaitu: (1) Keluarga, kekerabatan, dan persahabatan (2) Ekonomi rumah tangga atau (3) Ekonomi domestik sekitar (*households*) dan dukungan sosial informal (4) Asosiasi sukarela, (5) LSM dan badan amal, (6) Kelompok swadaya dan kelompok pendukung (*self help group* dan *support group*), (7) Koperasi dan usaha bersama, (8) Perusahaan atau wirausaha sosial, (9) Wirausaha, perusahaan keluarga, usaha kecil, (10) Agama, iman, dan kerohanian.

Bagaimana masa depan politik masyarakat sipil? Pasca-pandemi Covid-19 kita bisa melihat beberapa perubahan penting antara lain terkait dengan jalinan masyarakat sipil ini terwakili dalam politik melalui kemampuan membentuk konstituensi sosial yang ada di masyarakat, menjaga kumpulan sumber daya budaya dan menjaga jaringan-jaringan intelektual yang luas. Karena itu politik masyarakat sipil memiliki tiga kekuatan utama yaitu: berpusat di masyarakat, merebut kekuasaan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri tapi untuk masyarakat sipil, dan memiliki sumber daya budaya dan intelektual yang dapat digunakan untuk mereformasi politik. Kehadiran teknologi internet dapat memaksimalkan politik masyarakat sipil karena individu dan kelompok dapat terhubung dan berorganisasi secara *online*, lokal, nasional, dan global. Di samping itu biaya keuangan dari pengorganisasian politik dan kegiatan pemilihan dapat dikurangi dengan jaringan biaya yang lebih rendah dan *crowd-sourcing*.

Kebangkitan politik masyarakat sipil adalah cara untuk mendelegasikan kekuasaan kepada rakyat, sebagai cara alternatif

ketimbang mengalihkan kekuasaan kepada negara atau pasar. Dengan demikian kegagalan pasar dan kegagalan negara bisa dicegah dan masyarakat sipil bisa diperkuat. Seperti bayangan yang digambarkan oleh Alexis de Toqueville maupun Robert Putnam, bahwa kehadiran asosiasi-asosiasi sipil yang semarak dan dinamis yang akan mempertahankan semangat demokrasi, manakala masyarakat politik (negara) dan masyarakat ekonomi (pasar) menghadapi kegagalan dalam membangun dan menyejahterakan kehidupan bersama, semoga.

Yogyakarta, 4 Juni 2022

Bambang Eka Cahya Widodo
Ketua Bawaslu Republik Indonesia
Periode 2011-2012.

Published by
SAMUDRA BIRU

KATA PENGANTAR

Di berbagai negara pandemi Covid-19 sejatinya adalah dua sisi dari sebilah pedang. Pandemi pada satu sisi telah menjadi mimpi buruk yang menjelma menjadi kenyataan di berbagai sektor, terutama di bidang kesehatan dan perekonomian. Banyaknya jumlah korban jiwa yang jatuh akibat pandemi maupun terpuruknya sektor ekonomi menjadi bukti nyata dari dampak destruktif yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini, tak terkecuali di Indonesia.

Namun di sisi lain, harus diakui bahwa banyak pelajaran berharga yang didapatkan dari pandemi Covid-19 yang menunjukkan upaya umat manusia untuk meretas jalan baru untuk dapat terus *survive* dalam sebuah situasi yang serba sulit sekalipun. Dalam perspektif *governance* misalnya, berbagai sektor tidak hanya diuji seberapa besar adaptabilitas dan agilitas mereka dalam berhadapan dengan pelbagai ketidakmenentuan yang ditimbulkan oleh situasi pandemi. Namun lebih dari itu berbagai aktor entah itu Negara, swasta, maupun *civil society* telah dipaksa untuk mengembangkan cara-cara baru dalam mengelola problem-problem yang muncul dari ketidakpastian tersebut.

Inovasi menjadi salah satu *blessing in disguise* yang lahir dari tekanan-tekanan yang muncul dari situasi pandemi sebagai wujud *lesson learned*. Inovasi ini sekaligus menjadi bukti otentik dan empiris bahwa umat manusia adalah makhluk yang pantang menyerah meskipun dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan kompleksitas persoalan kehidupan. Dengan demikian, inovasi sesungguhnya adalah deklarasi ulang bahwa manusia memang makhluk pembelajar, sehingga pantas untuk menyandang nama latinnya, *Homo sapiens*.

Buku berjudul *Demokrasi dan Civil Society: Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia* yang saat

ini berada di tangan pembaca adalah sebuah upaya kesekian kalinya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk memotret pandemi. Kali ini, potret tersebut mengilustrasikan berbagai inovasi yang dihasilkan dari proses pembelajaran terhadap situasi pandemi. Meskipun mendudukan *civil society* sebagai pemeran utama dalam terbitan kali ini, akan tetapi sejatinya *civil society* tetap harus berbagi peran dan berkolaborasi dengan aktor-aktor lain agar inovasi-inovasi yang dihasilkan bisa lebih lengkap dan komprehensif, serta berdampak luas, di mana hal-hal tersebut juga berusaha untuk *capture* oleh buku ini.

Dalam kesempatan yang membahagiakan ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh penulis yang telah bersedia berkontribusi. Tentu saja, ucapan terima kasih dan apresiasi tersebut juga tertuju kepada para editor yang di tengah kesibukannya masing-masing telah meluangkan segenap waktu dan energinya untuk menjahit buku ini sehingga dapat mewujudkan menjadi buku yang saat ini ada di hadapan sidang pembaca. Akhirul-kalam, semoga buku yang bersahaja ini dapat bermanfaat bagi sidang pembaca dan menjadi sumber informasi serta mata air inspirasi untuk terus berkarya.

Bantul, 10 April 2022
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si.

Published by
SAMUDRA BIRU

DAFTAR SINGKATAN

ABPD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APD	: Alat Pelindung Diri
ADP	: <i>Areal Division of Power</i>
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ABCGM	: <i>Academic, Bussiness, Community, Government and Media</i>
AJI	: Aliansi Jurnalis Independen
BLT-DD	: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPS	: Badan Pusat Statistik
BSS	: Bantuan Sosial Sembako
BPT	: Basis Data Terpadu
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
BI	: Bank Indonesia
CIP	: <i>Complex Intergovernmental Problems</i>
CDP	: <i>Capital Division of Power</i>
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
COSO	: <i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i>
CIPP	: <i>Context, Input, Process, dan Product</i>
CHSE	: <i>Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainable</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DDOS	: <i>Distributed denial-of-service</i>
EHAC	: <i>Electronic-Health Alert Card</i>
EIU	: <i>Economist Intelligence Unit</i>
FGD	: <i>Focus Group Discusion</i>

FPRB	: Forum Penanggulangan Resiko Bencana
HAM	: Hak Asasi Manusia
HTM	: Harga Tiket Masuk
HLL	: <i>Hygiene, Low touch, and Less crowd</i>
IDI	: Indeks Demokrasi Indonesia
ICM	: <i>Integrated Crisis Mapping</i>
ICT	: <i>Information, Communication and Technology</i>
ILM	: Iklan Layanan Masyarakat
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>
JPS	: Jaring Pengaman Sosial
KEPPRES	: Keputusan Presiden
KPC	: Komite Penanganan Covid-19
KIC	: Katadata Insight Center
KRI	: Komunitas Relawan Independen
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPPS	: Keputusan Pihak Penyelenggara Pilkada
KOMINFO	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
LP3ES	: Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LPMD	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
NDP	: <i>Non-Governmental Division of Power</i>
ODTW	: Obyek dan Daya Tarik Wisata
OECD	: Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi
PAD	: Pendapatan Asli Desa
PDB	: Pendapatan Domestic Bruto
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PDTT	: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PRB	: Pengurangan Risiko Bencana
PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
PHBS	: Pola Hidup Bersih dan Sehat
PP	: Peraturan Pusat
PT	: Perseroan Terbatas
PMI	: Palang Merah Indonesia
PSBB	: Pemberantasan sosial Berskala Besar

PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PERPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKH	: Program Keluarga Harapan
PLBDN	: Pos Lintas Batas Darat Negara
QDAS	: <i>Qualitative Data Analysis Software</i>
RPD	: Rencana Pembangunan Desa
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
RTSM	: Rumah Tangga Sangat Miskin
RI	: Republik Indonesia
SK	: Surat Keputusan
SMRC	: Saiful Mujani Research and Consulting
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
TKA	: Tenaga Kerja Asing
TGC	: Tim Gerak Cepat
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
TI	: Teknologi Informasi
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNFPA	: <i>United Nations Fund for Population Activities</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU ITE	: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WFH	: <i>Work From Home</i>
WFO	: <i>Work From Office</i>

Published by
SAMUDRA BIRU

DAFTAR ISTILAH

Bappenas	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
COVID-19	: Salah satu fenomena dimana sebuah virus menyebar serta menyerang saluran pernapasan manusia.
Desa APU	: Desa Anti Politik Uang
Daring	: Suatu aktivitas atau kegiatan yang mengarah langsung pada jaringan internet, baik menggunakan smartphone, laptop, dan PC
GSoD	: Global State of Democracy
Kedungsepur	: Istilah umum yang merupakan singkatan dari beberapa nama wilayah otonom di eks-karesidenan.
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Kemendes PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Limbah elektronik	: Sampah atau limbah yang berasal dari peralatan elektronik.
Lockdown	: Istilah <i>lockdown</i> dimaknai sebagai suatu kebijakan pembatasan bagi komunitas atau orang agar tetap berada di areanya selama bahaya ancaman masih terjadi.
Menko PMK	: Menteri Negara Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Nataru	: Natal dan Tahun Baru

Publinteraksi
SAMUDRA BIRU

PPKM	: dilakukan untuk membatasi interaksi dan pertemuan yang diharapkan dapat mengurangi penularan COVID-19
Pilpres	: Pemilihan Presiden
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
P-DTP	: Pajak Ditanggung Pemerintah
<i>Sagoe Cut</i>	: merupakan bagian dari perangkat daerah <i>Sagoe</i> (kabupaten) atau kota.
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
Seknas PEKKA	: Sekretariat Nasional Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
UMKM	: sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil.
UN Women	: Entitas Perserikaaan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan.
Varian Coblos	: Sebagai varian surat suara tidak sah terbanyak dibanding varian yang lainnya yang mengindikasikan faktor pemilih sebagai faktor dominan.
Website	: Kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet.

DAFTAR ISI

PRAKATA EDITOR	v
KATA PENGANTAR	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR ISTILAH	xix
DAFTAR ISI	xxi

BAB 1 GOVERNANCE, KRISIS, DAN INOVASI DI MASA PANDEMI COVID-19

Re-Design Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia

M. Daimul Abror 2

Inovasi Strategi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Amarta” dan “Tirta Mandiri” dalam Menjaga Eksistensi di Masa Pasca Pandemi Covid-19

Juhari Sasmito Aji, Rossi Maunofa Widayat & M. Lutfie Khoiri 22

Penguatan Tata Kelola Kolaborasi Pariwisata-Bencana Menuju Next Normal di Kawasan “Kedungsepur”

Muchamad Zaenuri & Ganapati Sjastru Satyani..... 46

Manajemen Krisis Pemerintah dalam Menangani Covid-19 di Indonesia

Rahmawati Husein, Tatryana Rendi Ziar Zhafira & Tiara Khariunnisa ... 87

Kolaborasi Pentahelix sebagai Sarana Penguatan UMKM di Yogyakarta Pasca Pandemi Covid-19 di Yogyakarta

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani & Vindhi Putri Pratiwi.... 121

Kolaborasi Model Pentahelix dalam Penanganan Bencana

Suswanta 140

Menguji Relevansi Konsepsi Governance Melalui Praktik Penanganan Covid-19 di Indonesia <i>Aprilianto Satria Pratama</i>	164
Urgensi Pengesahan Permendikbud No. 30 di Masa Pandemi Covid-19 sebagai Respon Atas Meningkatnya Kekerasan Seksual di Indonesia <i>Eli Kardilla & Melania Novitasari</i>	184
Belajar dari Pandemi Covid-19: Komunikasi Krisis sebagai Alternatif Perspektif Komunikasi Pemerintahan di Masa Krisis <i>Dian Eka Rahmawati & Misran</i>	202
BAB 2 POLITIK ELEKTORAL DI MASA PANDEMI COVID-19	
Respon Netizen Terhadap Desa Anti Politik Uang dan Identifikasi Desa Anti Politik Uang <i>Bambang Eka Cahya Widodo & Moch Edward Trias Pahlevi</i>	228
Pandemi Covid-19 dan Faktor Penyebab Surat Suara Tidak Sah Pada Pilkada Kabupaten Sleman 2020 <i>Ridho Al-Hamdi & Sakir</i>	248
BAB 3 DEMOKRASI DAN GENDER DI MASA PANDEMI COVID-19	
Refleksi Demokrasi: Represifitas dan Fenomena Spiral Of Silence <i>Titin Purwaningsih & Azka Abdi Amrurrobi</i>	284
Pendayagunaan Indeks Demokrasi Indonesia di Era Pandemi: Pelajaran dari Empat Kabupaten/Kota <i>David Efendi, Husni Amriyanto Putra & Fauzan Sandiah</i>	309
E-Demokrasi di Indonesia, Antara Peluang dan Hambatan Melalui Analisis Media Daring <i>Bachtiar Dwi Kurniawan & Moch Edward Trias Pahlevi</i>	334

Perempuan di Masa Pandemi Covid-19: Ketimpangan Gender di Dalam Keluarga pada Tatanan Hidup Baru	
<i>Fajar Apriani</i>	353
Lokalisasi Demokrasi: Peran Identitas Budaya Dalam Gerakan Politik Keistimewaan Di Di Yogyakarta	
<i>David Efendi, Prawira Yudha Pratama & Bubu Alim Swarga</i>	371
BAB 4 CIVIL SOCIETY DAN DEMOKRATISASI INFORMASI DI MASA PANDEMI COVID-19	
Pengelolaan Website Corona Jogjaprov.go.id sebagai Media Sosialisasi Masyarakat dalam Mencegah Pandemi Covid-19	
<i>Reazha Nur Oktavianti & Yeni Rosilawati</i>	406
Deliberative Policy: Urgensi Konsistensi Data Covid-19 di Indonesia	
<i>Tri Sulistyarningsih & Umi Kulsum</i>	435
Evaluasi Program Smart Environment di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus: Program Penjemputan Limbah Elektronik E-Waste di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta)	
<i>Ummi Zakiyah & Danty Yuansah</i>	454
Daya Tahan Masyarakat Sipil Berbasis Komunitas dalam Gerakan Pertanian Kota di Yogyakarta	
<i>Lantip Fajar Utomo & David Efendi</i>	477
Respon Civil Society Terhadap Aplikasi PeduliLindungi Melalui Hastag Twitter #Pedulilindungi	
<i>Sanny Nofrima, Herdin Arie Saputra & Dian Eka Rahmawati</i>	488
Engagement Publik dalam Opini Media Sosial: Kebijakan PPKM Level 3 Natal dan Tahun Baru 2022	
<i>Mohamad Sukarno & Utami Nur</i>	507
Menutup Peluang Korupsi di Tengah Pandemi	
<i>Tunjung Sulaksono</i>	526

INDEKS	553
BIOGRAFI.....	559

Published by
SAMUDRA BIRU

BELAJAR DARI PANDEMI COVID-19: KOMUNIKASI KRISIS SEBAGAI ALTERNATIF PERSPEKTIF KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DI MASA KRISIS

Dian Eka Rahmawati

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
dianekarahmawati93@gmail.com

Misran

Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
misranalfarabi@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 merupakan situasi krisis, dimana seharusnya komunikasi pemerintahan dilakukan dengan pendekatan komunikasi krisis yang mengedepankan informasi yang cepat, akurat, transparan, solutif, dan empatik, sehingga bisa mengurangi dampak negatif dari krisis yang terjadi. Penelitian ini merupakan kajian literatur untuk memetakan konsep dan penelitian-penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kajian komunikasi krisis sebagai salah satu perspektif komunikasi di masa krisis dan berbagai kajian komunikasi pemerintahan dalam perspektif komunikasi krisis pada masa pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yang diperoleh melalui data base scopus dan publis or perish. Selanjutnya data dianalisa menggunakan tools vos viewer. Kajian ini menemukan bahwa berbagai studi mengenai komunikasi krisis berkaitan

secara signifikan dengan kajian dan konsep tentang manajemen krisis, kondisi krisis, komunikasi publik, media sosial. Sedangkan berbagai studi mengenai komunikasi krisis sebagai pendekatan dalam komunikasi pemerintahan di masa pandemi Covid-19 berkaitan dengan kajian dan konsep tentang kajian mengenai pandemi, strategi komunikasi, komunikasi pemerintahan, komunikasi resiko, kepercayaan, dan sosial media. Komunikasi krisis menjadi salah satu perspektif komunikasi yang penting pada kondisi krisis yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi kepada publik. Sangat penting menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pada kondisi krisis, termasuk pada berbagai informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, akurat, *update*, dan transparan mengenai kondisi krisis yang terjadi. Upaya melawan berbagai informasi *hoaks* yang dapat membingungkan dan menambah ketidakpastian masyarakat harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Dengan kondisi seperti itu, pemerintah akan mendapatkan legitimasi dan dapat memobilisasi partisipasi masyarakat dalam setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah di masa krisis untuk meminimalisir dampak negatif dari krisis yang terjadi.

Kata Kunci: *Komunikasi Pemerintahan, Komunikasi Krisis, Pandemi Covid-19*

A. PENDAHULUAN

Komunikasi pemerintahan bisa diartikan sebagai proses penyampaian berbagai informasi yang bersumber dari pemerintah kepada *stakeholders* internal dan eksternal. Oleh karena itu, fungsi komunikasi pemerintahan bisa dibedakan ke dalam fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal berkaitan dengan komunikasi organisasional di dalam birokrasi dan fungsi eksternal berkaitan dengan komunikasi kepada masyarakat maupun *stakeholders* eksternal lainnya. Penjelasan tersebut menempatkan pemerintah sebagai komunikator utama

dan dominan dalam komunikasi pemerintahan, meskipun bukan berarti masyarakat tidak bisa memberikan *feedback* dan bertukar posisi sebagai komunikator dalam situasi tertentu. Hal ini semakin menjadi keniscayaan ketika media digital menjadi salah satu media komunikasi yang terus berkembang dan semakin banyak penggunaannya, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Pandemi Covid-19 secara faktual telah berpengaruh terhadap banyak aspek kehidupan, khususnya aspek sosial dan ekonomi, yang menempatkan masyarakat pada posisi yang serba tidak pasti. Oleh karena itu, di masa pandemi Covid-19, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, jelas, akurat, dan transparan. Ironisnya, di tahun pertama pandemi terjadi di Indonesia, pemerintah justru menyampaikan informasi tentang Covid-19 secara simpang siur dan tidak transparan. Pemerintah mempertontonkan kegagalan komunikasi internal birokrasinya, yang ditunjukkan dari kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu singkat sehingga terkesan inkonsisten dan tidak ada koordinasi antar sektor. Begitu juga dengan komunikasi eksternal kepada masyarakat yang ditunjukkan dari pernyataan antara satu menteri dengan menteri lain yang bertolak belakang, hingga guyonan seputar Covid-19 oleh jajaran kabinet Presiden Jokowi.

Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dalam risetnya menemukan bahwa dalam kurun waktu Februari – April 2020 saja setidaknya terdapat 37 pernyataan kabinet Presiden Joko Widodo yang menunjukkan kekeliruan atau kegagalan dalam menjalankan komunikasi pemerintahan. Pada fase krisis, pemerintah terkesan menyepelekan dan menunjukkan sikap penolakan dugaan masuknya Covid-19 ke Indonesia. Ketika negara lain sudah mulai memberlakukan kebijakan *lockdown*, justru Presiden dan sejumlah menteri mewacanakan membuka dan menggalakkan pariwisata. Contoh lain tentang krisis komunikasi pemerintahan adalah pernyataan Jokowi mengenai status darurat sipil yang diralat menjadi darurat kesehatan, hingga polemik mudik lebaran.

Pemerintah inkonsisten menyatakan kasus seorang pasien di Cianjur meninggal dunia bukan karena Covid-19, tapi kemudian diralat sebagai pasien yang meninggal karena positif terinfeksi Covid-19 (Farisa, 2020).

Krisis komunikasi pemerintahan tersebut mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai sumber informasi atau komunikator, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan kesulitan bagi pemerintah untuk memobilisasi masyarakat dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pandemi Covid-19 merupakan situasi krisis, dimana seharusnya komunikasi pemerintahan dilakukan dengan pendekatan komunikasi krisis yang mengedepankan informasi yang cepat, jelas, akurat, dan transparan.

Mengacu pada latar belakang di atas, kajian ini bertujuan untuk memetakan dan mengidentifikasi: kajian komunikasi krisis sebagai salah satu perspektif komunikasi di masa krisis dan kajian komunikasi pemerintahan dalam perspektif komunikasi krisis di masa pandemi Covid-19. Pada penelitian ini penulis menggunakan kajian literatur dengan menggunakan software Vosviewer dalam memetakan konsep dan penelitian sebelumnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yang diperoleh melalui data base scopus dan publis or perish. Selanjutnya data dianalisa menggunakan tools vos viewer.

B. PEMBAHASAN

1. Komunikasi Pemerintahan: Telaah Literatur

Sebelum membahas mengenai studi komunikasi pemerintahan, terlebih dulu kita perlu mendudukkan pemahaman mengenai komunikasi. Ketika menelusuri berbagai literatur komunikasi, kita akan menemukan beberapa konsep dan pengertian komunikasi dari banyak pakar komunikasi, antara lain dikemukakan oleh Berlo dalam bukunya “*Communication Process*” yang menjelaskan keberhasilan proses komunikasi sebagai “suasana yang penuh keberhasilan jika penerima pesan

memiliki makna yang sama dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber atau komunikator”. Myers & Myers, mengemukakan pendapatnya tentang komunikasi sebagai “titik pusat kekuatan yang menyatukan di antara yang berbeda sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan karenanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir” (Hasan, 2020).

Pendapat lain menyatakan komunikasi sebagai pengoperan ide dan gagasan dalam rangka menyatukan kekuatan sehingga terjadi interaksi antara orang-orang yang berkomunikasi menuju pencapaian tujuan bersama yaitu kesamaan makna. Dalam pandangan Hovlan “*communication is the process by which an individual transmits stimuli usually verbal symbols to modify the behaviour of other individuals.*” (Komunikasi adalah proses di mana seorang individu memindahkan secara terus menerus simbol verbal untuk mengubah tingkah laku individu lain) (Hovland, 1948). William Albright dalam bukunya yang berjudul “Public Opinion” (1939) mendefinisikan komunikasi sebagai: “*the process of transmitting meaningful symbols between individuals*”. (Proses pemindahan simbol yang bermakna di antara individu-individu). Pada tahun yang sama, Wilbur Schramm, seorang pakar komunikasi dari Stanford University, mendefinisikan komunikasi sebagai “*the sharing of an orientation toward a set of information signs*”. Sementara itu, Kincaid, mengemukakan bahwa “komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan bertalian antara para peserta dalam proses informasi”. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Siporin bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dan dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi/mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan diantara orang-orang yang berinteraksi”.

Berbagai konsep dan pengertian mengenai komunikasi yang disampaikan oleh para pakar di atas, dapat ditarik benang merah bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator (sender/pihak yang menyampaikan pesan) kepada komunikan (receiver/pihak yang menerima pesan)

Published by
SAMUDRA PERU

dengan menggunakan media tertentu dan menghasilkan efek tertentu. Pesan yang disampaikan bisa berupa berbagai informasi, ide, perasaan, kebijakan, dan lain-lain. Efek yang dihasilkan bisa berupa efek kognisi, efek afeksi, dan efek perilaku. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dalam suatu proses komunikasi setidaknya terdiri dari elemen komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek.

Pengertian komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (Munandar & Suherman, 2016). Arti dari komunikasi pemerintahan di sini adalah pemerintah dalam hal ini dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat. Dalam kondisi yang demikian pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, bahkan untuk merespon keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Erliana Hasan menyebutkan bahwa komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Komunikasi pemerintahan sering disebut juga sebagai komunikasi politik. Menurut seorang pakar politik, Maswadi Rauf, komunikasi politik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu yang berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku politik (Thaib, 2019). Komunikasi politik dilihat dari 2 dimensi, yaitu kegiatan politik sebagai kegiatan politik dan sebagai kegiatan ilmiah. Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan tersebut bersifat empiris karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial. Sementara itu, komunikasi politik sebagai kegiatan ilmiah

melihat komunikasi politik merupakan salah satu kegiatan politik dalam sistem politik (Hariyanto, 2019).

Dalam komunikasi, komunikator merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Beberapa studi mengidentifikasi sejumlah karakteristik yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Ada beberapa komponen yang harus ada pada komunikator menurut Djamaluddin yaitu (Palar, 2021).

- a) Kredibilitas sumber mengacu pada sejauh mana sumber dipandang memiliki keahlian dan dipercaya. Semakin ahli dan dipercaya sumber informasi semakin efektif pesan yang disampaikan.
- b) Daya tarik seorang komunikator bisa terjadi karena penampilan fisik, gaya bicara, sifat pribadi, keakraban, kinerja, keterampilan komunikasi dan perilakunya.
- c) Sumber disukai oleh masyarakat bisa jadi karena sumber tersebut mempunyai kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan dan perasaan

María José Canel dan Karen Sanders dalam bukunya: *Government Communication: An Emerging* (2012) “*Government communication refers to the aims, role and practice of communication implemented by executive politicians and officials of public institutions in the service of a political rationale, and that are themselves constituted on the basis of the people’s indirect or direct consent and are charged to enact their will*”. Hal ini memiliki pengertian bahwa komunikasi pemerintahan mengacu pada tujuan, peran dan praktek komunikasi yang dilaksanakan oleh politisi eksekutif dan pejabat dari lembaga-lembaga publik lainnya dalam kerangka pelayanan pemikiran politik, dan yang sendirinya merupakan atas dasar persetujuan langsung atau tidak langsung rakyat dan dibebankan untuk memberlakukan mereka.

Stromback and Kiouisis (2011) dalam bukunya *Introduction: Mapping the Fields of Government Communication* Jesper Strömbäck (2019) mendefinisikan komunikasi pemerintahan dalam

Published by
SAMUDRA BIRU

kerangka *political public relations*. *Political public relations is the management process by which an organization or individual actor for political purposes, through purposeful communication and action, seeks to influence and to establish, build, and maintain beneficial relationships and reputations with its key publics to help support its mission and achieve its goals.*

2. Komunikasi Krisis: Alternatif Perspektif Komunikasi Pemerintahan di Masa Krisis

Timothy Coombs mendefinisikan krisis sebagai persepsi akan kejadian yang tidak dapat diprediksi yang mengancam harapan pemangku kepentingan yang secara serius dapat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi dan kemungkinan menghasilkan output atau pengaruh negatif (Akhyar & Pratiwi, 2019; Suryana, 2019). Krisis merupakan suatu fenomena yang terjadi secara tidak terduga yang dapat mengancam harapan penting pemerintah terkait masalah kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan ekonomi, yang mana hal itu dapat memberikan dampak negatif terhadap suatu instansi ataupun organisasi (Siti Lutfiatul Mardiyah, 2021).

Definisi lain menurut Michael Regester dan Judy Larkin krisis adalah kondisi pemerintahan yang membuat pemerintah sedang menjadi objek pembicaraan oleh kalangan luas (Prayudi, 2016). Steven Fink dalam bukunya *Crisis Management Planning For the Innevitabile* mendefinisikan krisis sebagai kondisi yang tidak stabil, di mana perusahaan harus mengambil tindakan dan keputusan secara cepat dan tepat. Sedangkan menurut Fearn-Banks adalah kejadian besar dengan hasil negatif yang berpotensi memengaruhi organisasi, perusahaan, atau industri, serta publik, produk, layanan, atau nama baiknya (Mutma, 2017). Krisis dapat mengancam keberadaan organisasi (Surahmat et al., 2021). Selanjutnya Coombs (2010) menyebutkan bahwa krisis adalah persepsi tentang peristiwa tidak terduga yang mengancam harapan penting para pemangku kepentingan terkait dengan masalah kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan ekonomi, dan dapat

secara serius memengaruhi kinerja organisasi serta menghasilkan hasil negatif. Definisi tersebut adalah sintesis berbagai perspektif tentang krisis. Dia mencoba untuk menangkap sifat-sifat umum yang digunakan penulis lain ketika menggambarkan krisis.

Pada umumnya, krisis dilihat sebagai suatu situasi atau kejadian yang lebih banyak mempunyai implikasi negatif pada organisasi daripada sebaliknya. Krisis pada dasarnya adalah sebuah situasi yang tidak terduga, artinya organisasi umumnya tidak dapat menduga bahwa akan muncul krisis yang dapat mengancam keberadaannya (Suharyanti & Sutawidjaya, 2012). Menurut Devlin a *“crisis” is an unstable time for an organization, with a distinct possibility for an undesirable outcome*, Yang berarti krisis merupakan suatu keadaan tidak stabil bagi suatu organisasi, dengan adanya kemungkinan untuk hasil yang tidak diinginkan (Aziz & Wicaksono, 2020; Coombs, 2010; Falkheimer & Heide, 2010; Junaedi, 1375). Selain itu, krisis dapat didefinisikan sebagai ancaman signifikan terhadap operasi yang dapat memiliki konsekuensi negatif jika tidak ditangani dengan baik.

Sedangkan komunikasi krisis adalah pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi yang diperlukan untuk menangani situasi krisis (Coombs, 2010). Sebuah fitur penting dari komunikasi krisis adalah pengelolaan komunikasi organisasi yang kompleks. Komunikasi krisis juga menunjuk pada dialog antara organisasi dan publiknya sebelum, selama, dan setelah kejadian negatif. Dialog merinci strategi dan taktik yang dirancang untuk meminimalkan kerusakan pada citra organisasi (Lim, 2020). Saat ini komunikasi krisis untuk Pemerintah di seluruh dunia, telah menghadapi krisis yang meningkat dari berbagai alam baik itu krisis ekonomi, krisis politik, krisis terkait teror dan pemisahan diri, dan terutama krisis akibat bencana alam (Goeritman, 2021), dan menambah daftar itu adalah sekali seabad krisis kesehatan seperti pandemi Covid-19.

Gambar: 1 Krisis Komunikasi



Gambar di atas menunjukkan bahwa kajian mengenai komunikasi krisis berkaitan secara signifikan dengan kajian dan konsep tentang manajemen krisis, kondisi krisis, komunikasi publik, dan media sosial. Komunikasi krisis menjadi salah satu perspektif komunikasi yang penting pada kondisi krisis yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi kepada publik. Sangat penting menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pada kondisi krisis, termasuk pada berbagai informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, akurat, *update*, dan transparan mengenai kondisi krisis yang terjadi. Media sosial pemerintah harus dikelola dengan baik sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya masyarakat. Upaya melawan berbagai informasi *hoaks* yang dapat membingungkan dan menambah ketidakpastian masyarakat harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Dengan kondisi seperti itu, pemerintah akan mendapatkan legitimasi dan dapat memobilisasi partisipasi masyarakat dalam setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah di masa krisis untuk meminimalisir dampak negatif dari krisis yang terjadi.

Krisis dapat terjadi kapan saja, tetapi dampak negatifnya dapat dicegah atau diminimalisir. Komunikasi krisis merupakan satu bagian penting dalam manajemen krisis mengenai cara mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikan, dilakukan,

dan apa yang telah dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi (Kriyantono, 2012). Kriyantono mengatakan bahwa terdapat prinsip dalam manajemen krisis yang berorientasi pada keselamatan publik, dalam public relations menerapkan bagaimana menggunakan strategi komunikasi krisis (1) untuk mengurangi kepanikan publik (2) untuk mengurangi rasa khawatir publik (3) untuk mengurangi prasangka-prasangka yang ada di masyarakat ketika terjadinya krisis (4) melindungi suatu instansi dari kritik-kritik yang berspekulasi dari publik di media massa (5) memiliki sifat yang dapat dipercaya (*accountability*), keterbukaan (*disclosure*), dan komunikasi berbasis keseimbangan kepentingan (*symmetrical communication*) (6) dibuat untuk meminimalisir kerusakan pada citra instansi.

3. Komunikasi Krisis sebagai Alternatif Perspektif Komunikasi Pemerintahan di Masa Pandemi Covid-19

Kurangnya upaya komunikasi yang memadai untuk mengatasi krisis dapat mempengaruhi reputasi, ekonomi, dan bidang kesehatan pemerintahan. Kapasitas pemerintah untuk berkomunikasi sangat penting untuk tata pemerintahan yang baik, terlebih lagi pada saat krisis. Komunikasi publik umumnya berfungsi untuk menginformasikan pemangku kepentingan, membujuk/mengadvokasi mereka, dan melibatkan warga dalam kegiatan pemerintah. Selama keadaan darurat, komunikasi publik menjadi lebih penting karena kegiatan pemerintah mungkin bersifat jangka pendek dan sering berubah, membutuhkan pengaturan komunikasi yang lebih responsif yang lebih cepat dan lebih profesional dalam pendekatan mereka (Sanjeev et al., 2021). Meskipun tidak ada strategi komunikasi 'satu ukuran yang cocok untuk semua' untuk menyampaikan informasi selama krisis yang berkepanjangan (Hyland-Wood et al., 2021). Kepercayaan publik adalah sumber daya penting dalam memanfaatkan kerja sama publik dan mempertahankan perilaku yang diperlukan untuk manajemen pandemi (Hyland-Wood et al., 2021), (Hyland-Wood et al., 2021).

publik, dan media sosial. Benang merah yang bisa ditarik adalah persoalan bagaimana pemerintah membangun strategi komunikasi pemerintahan kepada publik di masa krisis, dan salah satu media yang cukup potensial digunakan adalah media sosial dimana arus informasi begitu deras dan rentan terhadap informasi *hoaks* yang menjadi ancaman runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Setiap krisis mengarah pada atribusi (menetapkan penyebab peristiwa), yang menyebabkan reaksi emosional di antara para pemangku kepentingan. Ketika sebuah organisasi dinilai bertanggung jawab atas krisis, kemarahan dibangkitkan, dan ketika tanggung jawab tidak diberikan kepada organisasi, itu membangkitkan simpati (Falkheimer & Heide, 2010). Reaksi emosional ini, yang dihasilkan dari atribusi, memutuskan transaksi pemangku kepentingan dengan organisasi yang terlibat dalam krisis. Manajemen krisis yang efektif membutuhkan upaya komunikasi krisis berbasis bukti untuk menyampaikan informasi yang benar kepada para pemangku kepentingan yang memungkinkan mereka untuk membuat atribusi yang tepat. Manajer krisis harus secara efektif membongkar sisi cerita mereka, atau pemangku kepentingan dapat dibajak oleh media atau bingkai pihak ketiga lainnya. Fungsi komunikasi akan melibatkan pelatihan para manajer untuk menangani media untuk manajemen krisis, meningkatkan jalur komunikasi dengan masyarakat lokal, dan meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan yang mengintervensi (pejabat kesehatan dan polisi dalam keadaan darurat Covid-19 saat ini) (Falkheimer & Heide, 2010). Komunikasi krisis yang dipikirkan dengan matang akan memperbarui para pemangku kepentingan dengan informasi yang teratur, tepat waktu, berguna, dan dapat diandalkan. Komunikasi seperti itu akan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membuat atribusi yang tepat terhadap krisis dan mengembangkan emosi yang tepat untuk bertindak sebagai motivator dalam menunjukkan perilaku yang sesuai. Komunikasi krisis yang efektif juga akan memastikan

keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengelola dan mengatasi krisis.

Tujuan komunikasi krisis tergantung pada tahap krisis. Ketika tahap krisis berubah, kebutuhan informasi pemangku kepentingan berubah, dan manajer krisis harus dapat memenuhi hal yang sama. Tahap pra-krisis melibatkan pengumpulan informasi tentang krisis yang akan datang, penilaian risiko, dan pelatihan tim krisis dan juru bicara. Tahap krisis mengumpulkan dan memproses informasi, menyebarkan pengetahuan kepada pengambil keputusan dan pemangku kepentingan terkait. Peran tahap pasca krisis adalah meninjau upaya manajemen krisis, memberikan pesan tindak lanjut, dan mendokumentasikan pembelajaran.

Komunikasi pemerintahan dengan pendekatan komunikasi krisis di masa pandemi Covid-19 menjadi penting selain untuk menginformasikan berbagai kebijakan juga untuk memberikan informasi terkini mengenai Covid-19 dan penanganannya. Namun dalam penyampaian informasi tersebut masih sering terjadi simpang siur antar berbagai pihak tentunya dalam penanganan Covid-19. Sejak Virus Corona terdeteksi pada awal Januari 2020 di Wuhan, China, pemerintah menganggap remeh wabah ini sehingga tidak ada aksi nyata sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19. Pada akhirnya, saat wabah ini tersebar di Indonesia pemerintah tampak tidak siap dan belum terkoordinasi dengan baik, sebab kasus ini muncul saat masyarakat belum teredukasi dan mempunyai cukup informasi mengenai Covid-19 sendiri (Humasindonesia.ID, 2020).

Di tengah penanganan Pandemi Covid-19 ini, pemerintah diharapkan benar-benar memperhatikan komunikasi krisis selama pandemi ini. Masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan transparan. Komunikasi krisis berperan penting untuk menciptakan kepercayaan publik bahwa negara siap menghadapi krisis. Komunikasi yang kuat dan terstruktur saat krisis ini merupakan kunci dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Namun, pada kenyataannya komunikasi

krisis pemerintah dalam penanganan Covid-19 belum efektif sehingga menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Mulai dari menganggapremeh urgensi ketika wabah ini muncul, penyampaian informasi serta data yang tidak transparan, ketidakselarasan informasi yang disampaikan maupun perbedaan pandangan antar pejabat pemerintah hingga saling bantah dan tuding. Hal tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola manajemen komunikasi secara tepat dalam penanganan COVID-19. Fenomena silang pendapat antara pusat dan daerah mencerminkan adanya kekacauan dalam tata kelola komunikasi pemerintahan. Kekacauan yang disebabkan oleh tiga hal berikut:

Gambar 3: Problem Komunikasi Pemerintahan



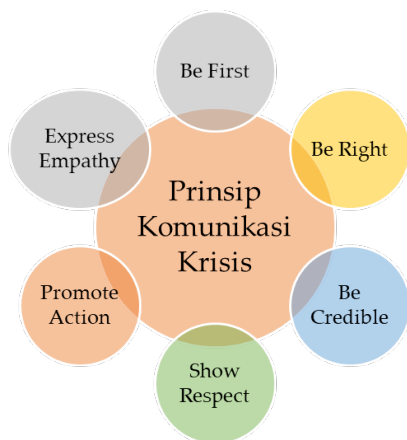
Berdasarkan penelusuran dokumen, setidaknya ada 4 (empat) masalah utama komunikasi pemerintahan dalam penanganan Covid-19 yang dihadapi pemerintah di Indonesia, yaitu kurang akuratnya data dan informasi, minimnya sosialisasi informasi terkait beberapa isu, rendahnya kepercayaan publik, dan kurang efektifnya komunikasi organisasi pemerintahan. Permasalahan kurang akuratnya data dan informasi antara lain dikemukakan Ahmad Arif yang mencontohkan data kematian yang tidak sesuai dengan panduan WHO (Sitorus, 2021).

Kurang efektifnya komunikasi organisasi pemerintahan dapat diketahui dari perbedaan kebijakan antar organisasi pemerintahan yang dikomunikasikan ke publik. Beberapa hal di antaranya yaitu tarik menarik kewenangan antara pusat dengan daerah (Chadijah et al., 2020), pemberian izin masuk bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di tengah pandemi Covid-19 (Sitorus, 2021) dan pengaturan pengoperasian ojek daring. Dari segi penamaan kebijakan hanya mencantumkan protokol komunikasi publik,

padahal komunikasi pemerintahan dalam penanganan Covid-19 meliputi dua aspek, yaitu komunikasi publik dan komunikasi organisasi pemerintahan.

Hal lain yang menjadi kekacauan dalam tata kelola komunikasi pemerintahan LP3ES mencatat ada 37 pernyataan blunder pemerintah terkait virus corona. Beberapa contoh blunder komunikasi itu misalnya Wakil Presiden yang menyebut virus corona menyingkir dari Indonesia karena doa qunut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat mengatakan bahwa virus ini tidak masuk ke Indonesia karena perizinannya susah (Hovland, 1948).

Gambar 4: Prinsip Komunikasi Krisis (Adhianty Nurjanah, 2020).



Dari keenam prinsip komunikasi krisis diatas salah satu yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah *Be First*, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa, keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan yang ada, yang berkaitan dengan virus corona. Keadaan krisis secara cepat, apa adanya, dan instruktif, atau memberitahu tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi krisis. Sayangnya, ada dua prinsip yang tidak terdapat dalam pola komunikasi pemerintah yakni empati (*Express Empathy*) dan rasa hormat (*Show Respect*). Dalam pandangan Horald D Lasswell mengatakan, strategi komunikasi dapat dikatakan efektif jika mampu menjawab

pertanyaan “Who Says What in Which Channel to Whom With What Effect?” (Fachrul Nurhadi, 2017).

- a) *Who* (Komunikator): Komunikator merupakan seseorang yang berperan sebagai pembuat pesan dan secara bersamaan berperan sebagai sumber dari suatu informasi dari segala kondisi baik secara tidak disengaja maupun disengaja.
 - b) *Says What* (Pesan): Pesan merupakan sesuatu hal yang dikirimkan baik langsung maupun tidak langsung. Pesan yang disampaikan dapat berupa verbal ataupun nonverbal.
 - c) *In Which Channel* (Media yang digunakan): Media merupakan suatu alat yang berperan sebagai perantara pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan.
 - d) *To Whom* (Komunikan): Komunikan merupakan kelompok atau individu tertentu yang menjadi target sasaran pesan yang disampaikan oleh komunikator, yang berperan sebagai penerima pesan dalam proses komunikasi.
- What Effect (Efek): Efek merupakan reaksi, tanggapan, ataupun respons komunikasi disaat seseorang menerima pesan dari pembuat pesan, dengan kata lain efek merupakan akibat dari aktivitas komunikasi.

Dalam pengelolaan komunikasi krisis, kesiapan pemerintah dalam menghadapi fenomena krisis yang terjadi sewaktu-waktu telah dituangkan dalam sebuah peraturan yang legal, yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adanya pedoman tersebut setidaknya dapat membuat suatu instansi pemerintahan bisa mengendalikan krisis untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor kunci keberhasilan pengelolaan komunikasi di lingkungan instansi pemerintah, yakni:

interaksi awal, komposisi tim, penguasaan krisis, kepemimpinan, budaya organisasi.

1. Interaksi awal

Pengalaman dalam menangani krisis yang pernah terjadi sebelumnya dapat menjadi acuan dalam manajemen krisis. Praktisi yang terlibat dalam anggota tim komunikasi krisis harus mempunyai *sense of crisis* untuk membaca fenomena krisis yang terjadi. Semakin peka dan cepat memahami, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dalam mencegah dan mengatasi krisis yang terjadi.

2. Komposisi tim komunikasi krisis

Kapasitas tim komunikasi krisis sangat mempengaruhi pengelolaan krisis. Komposisi anggota tim yang berpengalaman dengan tugasnya, kerja tim akan berjalan secara efektif dan akan mudah mencapai tujuan yang akan dicapai.

3. Pengetahuan dan penguasaan dalam krisis

Krisis menyebabkan kondisi yang tidak stabil. Dibutuhkan pengetahuan dan penguasaan krisis yang memadai. Praktisi humas harus mempelajari seluruh aspek krisis yang terkait dengan instansi pemerintahannya sehingga dapat diambil keputusan yang tepat.

4. Kemampuan Kepemimpinan

Kemampuan kepemimpinan dalam situasi krisis sangatlah penting. Kepemimpinan membantubagaimanamenyelesaikan pengelolaan krisis yang sesuai dengan cara dan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang positif dapat membantu percepatan dalam mengatasi krisis. Apabila organisasi tersebut memiliki lingkungan positif dan stabil, maka segala aktivitas pengelolaan krisis oleh tim komunikasi akan berjalan dengan efektif. Dengan demikian output yang diinginkan akan terukur.

Banyak model telah diusulkan untuk menjelaskan pentingnya komunikasi krisis dan dampaknya dalam menyelamatkan reputasi organisasi. Teori perbaikan citra (IRT) misalnya berpendapat bahwa citra perusahaan harus dilindungi selama krisis. Model komunikasi krisis lain yang umum diterapkan adalah teori komunikasi krisis situasional (SCCT) (Sagita, 2021). SCCT didasarkan pada teori atribusi dan mengusulkan bahwa pemangku kepentingan mengaitkan tanggung jawab kepada organisasi selama krisis. SCCT berfokus pada persepsi pemangku kepentingan tentang krisis dan mengelolanya secara efektif. Komunikasi krisis yang dimediasi sosial (SMCC) diusulkan untuk memahami komunikasi krisis di dunia yang semakin digital (Koswara, 2014). Model Integrated Crisis Mapping (ICM) berfokus pada perubahan emosional pemangku kepentingan selama tahap krisis (dua set emosi dipelajari, yang meliputi kemarahan/kecemasan dan kesedihan/ketakutan) (Akhyar & Pratiwi, 2019; Coombs, 2010). Model komunikasi krisis lainnya yang umum dilihat termasuk pendekatan berbasis ko-variasi untuk komunikasi krisis, wacana pembaruan, dan Teori Arena Retorika (RAT). Semua model komunikasi krisis di atas menangani emosi pemangku kepentingan selama krisis dan bagaimana mereka dapat mengelolanya melalui tanggapan yang tepat, terutama komunikasi, untuk menyelamatkan reputasi organisasi. Komunikasi pemerintahan yang efektif dalam penanganan pandemi Covid-19 juga dapat dilakukan dengan menempatkan Covid-19 sebagai complex intergovernmental problems (CIP). Sebagaimana dikemukakan Schertzer dengan Covid-19 sebagai CIP, maka setiap elemen pemerintahan terkait wajib memahami bahwa dalam menghadapi CIP (Rahmayanti, 2021).

C. KESIMPULAN

Krisis merupakan suatu fenomena yang terjadi secara tidak terduga yang dapat mengancam harapan penting pemerintah terkait masalah kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan

Published by
SAMUDRA BIRU

ekonomi, yang mana hal itu dapat memberikan dampak negatif terhadap suatu instansi ataupun organisasi. Pada situasi krisis, dimana pada umumnya masyarakat berada dalam ketidakpastian termasuk ketidakpastian informasi yang melimpah khususnya di media sosial, maka pemerintah bisa menerapkan komunikasi krisis dalam komunikasi pemerintahannya.

Kajian ini menemukan bahwa berbagai studi mengenai komunikasi krisis berkaitan secara signifikan dengan kajian dan konsep tentang manajemen krisis, kondisi krisis, komunikasi publik, media sosial. Sedangkan berbagai studi mengenai komunikasi krisis sebagai pendekatan dalam komunikasi pemerintahan di masa pandemi Covid-19 berkaitan dengan kajian dan konsep tentang kajian mengenai pandemi, strategi komunikasi, komunikasi pemerintahan, komunikasi resiko, kepercayaan, dan sosial media.

Komunikasi krisis menjadi salah satu perspektif komunikasi yang penting pada kondisi krisis yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi kepada publik. Sangat penting menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pada kondisi krisis, termasuk pada berbagai informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, akurat, *update*, dan transparan mengenai kondisi krisis yang terjadi. Media sosial pemerintah harus dikelola dengan baik sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya masyarakat. Upaya melawan berbagai informasi *hoaks* yang dapat membingungkan dan menambah ketidakpastian masyarakat harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Dengan kondisi seperti itu, pemerintah akan mendapatkan legitimasi dan dapat memobilisasi partisipasi masyarakat dalam setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah di masa krisis untuk meminimalisir dampak negatif dari krisis yang terjadi.

Kesiapan pemerintah untuk menghadapi fenomena krisis yang terjadi sewaktu-waktu telah dituangkan dalam sebuah regulasi berupa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut diharapkan bisa menjadi pedoman di lingkungan organisasi pemerintah supaya bisa mengelola komunikasi pemerintahan untuk meminimalisir dampak negatif dari krisis yang terjadi. Namun demikian, pada masa krisis pandemi Covid-19 pemerintah masih mengalami kegapohan terutama pada tahun pertama 2019-2020. Maka belajar dari pandemi Covid-19 di tahun awal melanda Indonesia, pemerintah bisa menggunakan komunikasi krisis sebagai alternatif perspektif komunikasi pemerintahan dalam penanganan krisis pandemi Covid-19 ke depan.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Adhianty Nurjanah, D. M. (2020). *Mencermati Komunikasi Krisis Pandemi Covid-19 Pemerintah Indonesia*.
- Akhyar, D. M., & Pratiwi, A. S. (2019). Media Sosial dan Komunikasi Krisis : Pelajaran dari Industri Telekomunikasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Ultimacomm*, 11(1), 35–52.
- Albig, W. (1939). *Public opinion*.
- Aziz, M. S., & Wicaksono, M. A. (2020). Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19. *Masyarakat Indonesia*, 46(2), 194–207. <https://doi.org/10.14203/jmi.v46i2.898>
- Chadjah, S., Suyadi, A., & Tohadi, T. (2020). Tarik Menarik Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 226–236. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/8091>
- Coombs, W. T. (2010). Ongoing Crisis Communication : Planning , Managing, and Responding. *IEEE Transactions on Professional Communication*, 52(2), 174–178. <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=05467305>

- Fachrul Nurhadi, Z. (2017). *Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Komunikasi*. 1, 90–91. journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/view/235/295.
- Falkheimer, J., & Heide, M. (2010). Crisis Communicators in Change: From Plans to Improvisations. In *The Handbook of Crisis Communication*. <https://doi.org/10.1002/9781444314885.ch25>
- Farisa, F. C. (20120). *LP3ES Catat Ada 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soal Covid-19*.
- Goeritman, H. I. N. (2021). Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 melalui Media Sosial. *Jurnal IPTEK-KOM*, 23(1), 1–19.
- Hariyanto, E. (2019). Komunikasi pemerintah dan efektivitas kebijakan. *Kemenkeu Learning Center, 2005, 2005–2007*. <https://klc.kemenkeu.go.id/pusku-komunikasi-pemerintah-dan-efektivitas-kebijakan/>
- Hasan, E. (2020). *Paradigma Komunikasi Pemerintahan*.
- Hovland, C. (1948). Social Communication. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 371–375.
- Humasindonesia.ID. (2020). *Krisis Komunikasi dalam Pandemi Covid-19*.
- Hyland-Wood, B., Gardner, J., Leask, J., & Ecker, U. K. H. (2021). Toward effective government communication strategies in the era of COVID-19. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00701-w>
- Jesper Strömbäck, S. K. (2019). *Komunikasi Publik Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19*.
- Junaedi, F. (1375). *Dinamika Komunikasi di Masa Pandemi Covid-19*.
- Koswara, A. (2014). Komunikasi Krisis: Analisis Upaya Respon Krisis Teluk Meksiko Dari Perspektif Public Relations. *Edutech*, 13(1), 107. <https://doi.org/10.17509/edutech.v13i1.3224>

- Kriyantono, R. (2012). *Public Relations & Krisis Management: Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis & Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Lim, J. R. (2020). How Organizations in Different Cultures Respond to Crises: Content Analysis of Crisis Responses between the United States and South Korea. *International Journal of Strategic Communication*. <https://doi.org/10.1080/1553118X.2020.1812613>
- María José Canel, K. S. (2012). Government communication: An emerging field in political communication research. *The Sage Handbook of Political Communication*, 85-96.
- Munandar, H., & Suherman, M. (2016). Aktivitas Komunikasi Pemerintahan Ridwan Kamil di Media sosial. *Jurnal Hubungan Masyarakat*, 2(1), 423–430. <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/humas/article/viewFile/3270/pdf>
- Mutma. (2017). Konferensi Nasional Komunikasi. *Konstruksi Media Republika Online Terhadap Pidato Pelantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan*, 01(01), 657–667. <http://pknk.org/index.php/PKNK/article/view/47/52>
- PALAR, M. J. J. A. J. R. N. (2021). Komunikasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Bersih Kampung Di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Maya. *JAP*, VII(106), 41–51.
- Prayudi. (2016). *Manajemen Isu dan Krisis*.
- Rahmayanti, A. (2021). *Optimalisasi Pusat Layanan Migrasi Desmigratif di Masa Pandemi*. 3(2), 80–91.
- Sagita, D. (2021). *Dinamika Komunikasi dan Politik*.
- Sanjeev, M. A., Pande, N., & Santhosh Kumar, P. K. (2021). Role of effective crisis communication by the government in managing the first wave Covid-19 pandemi – A study of Kerala government's success. *Journal of Public Affairs*, 21(4). <https://doi.org/10.1002/pa.2721>

- Siti Lutfiatul Mardiyah, A. N. S. (2021). Strategi Komunikasi Krisis Humas Pemerintah Kabupaten Jember dalam Penanganan. *E-Proceeding of Management*, 8(5), 7624–7635.
- Sitorus, A. A. (2021). Disinkronisasi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Renaissance*, 6(1), 721. <https://doi.org/10.53878/jr.v6i1.137>
- Suharyanti, & Sutawidjaya, A. H. (2012). Analisis Krisis Pada Organisasi Berdasarkan Model Anatomi Krisis Dan. *Journal Communication Spectrum*, 2(2), 165–185.
- Surahmat, A., Dida, S., Zubair, F., Surahmat, A., Dida, S., & Zubair, F. (2021). Analysis of the Government ' s Crisis Communication Strategy Discourse to Defend Covid-19 Analisis Wacana Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah Menangani Covid-19. *Jurnal Komunikasi*, 13(1), 36–53.
- Suryana, C. (2019). *Komunikasi Politik Teori dan Praktik*.
- Thaib, E. J. (2019). Komunikasi Politik Ditinjau Dari Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Politik. *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah*, 16(1), 274–282.

INDEKS

A

aktor vii, viii, 3, 6, 19, 50, 95, 126,
127, 128, 147, 149, 153, 156,
164, 165, 166, 167, 168, 171,
172, 173, 174, 175, 177, 178,
179, 180, 181, 206, 212, 227,
229, 237, 238, 239, 240, 242,
243, 289, 375, 435, 491, 499,
510, 518
alternatif 28, 51, 145, 158, 221, 439,
455, 457, 499, 523, 524, 543
Anti Politik Uang xiii, 226, 227, 230,
231, 232, 233, 236, 242, 243,
244, 245
aplikasi 76, 136, 333, 345, 463, 466,
470, 471, 479, 485, 487, 488,
489, 490, 493, 494, 495, 496,
497, 498, 499, 500, 540, 541,
542, 545

B

bencana alam v, 89, 141, 142, 161,
209

C

Civil Society vii, 397, 475, 481, 483,
484, 486, 490, 498, 502, 503
Covid-19 v, vii, x, xvi, 2, 3, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25, 28, 31, 32,
33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51,
53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,

105, 107, 108, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 128, 129, 130, 136, 138,
139, 140, 141, 143, 144, 145,
146, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 181, 201, 202,
203, 204, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 246, 250, 270,
273, 280, 281, 290, 291, 292,
293, 294, 295, 297, 298, 299,
300, 301, 302, 303, 314, 319,
320, 321, 326, 330, 331, 333,
335, 336, 337, 338, 339, 340,
342, 344, 346, 347, 349, 350,
351, 352, 353, 354, 357, 358,
359, 360, 361, 362, 363, 364,
365, 366, 402, 403, 404, 405,
412, 413, 415, 416, 418, 419,
420, 422, 423, 424, 425, 426,
429, 430, 432, 433, 434, 435,
436, 437, 438, 439, 440, 441,
442, 443, 444, 445, 446, 447,
448, 449, 450, 474, 476, 477,
478, 479, 480, 481, 483, 500,
501, 502, 503, 505, 509, 511,
513, 514, 515, 516, 518, 519,
521, 522, 523, 524, 525, 526,
527, 528, 529, 530, 531, 533,
534, 537, 538, 540, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 547, 548

D

dampak ekonomi 95, 99
deliberative 432, 433, 438, 439, 440,
441, 443
demokrasi v, vi, 226, 228, 230, 231,

- 235, 241, 243, 246, 247, 248,
249, 253, 254, 255, 266, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 289,
290, 291, 292, 293, 294, 300,
301, 302, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321,
323, 324, 325, 326, 330, 332,
333, 334, 335, 340, 341, 342,
346, 347, 367, 368, 369, 372,
373, 374, 375, 376, 377, 378,
381, 385, 388, 389, 396, 478,
499
- Desa ix, x, xi, xiii, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38,
39, 41, 42, 43, 44, 45, 149, 152,
153, 154, 155, 161, 162, 223,
226, 227, 228, 229, 230, 231,
232, 233, 236, 238, 239, 240,
242, 243, 244, 245, 359, 360,
365, 392, 473, 483, 530, 531
- desentralisasi vi, 6, 309, 368, 381,
396, 432, 433, 434, 439, 445,
446
- E**
- e-community 331
- E-Demokrasi 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 346,
348
- edukasi 30, 76, 158, 193, 198, 296,
297, 403, 404, 412, 423, 429,
462, 500
- ekonomi ii, vii, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 32, 33, 42, 45, 47, 49, 51,
55, 65, 74, 77, 78, 79, 92, 94,
95, 97, 99, 100, 102, 103, 107,
108, 110, 111, 121, 123, 124,
125, 126, 127, 129, 130, 133,
137, 138, 149, 165, 167, 168,
171, 172, 173, 175, 176, 179,
186, 187, 203, 208, 209, 211,
219, 226, 228, 239, 253, 254,
255, 289, 309, 312, 313, 314,
318, 319, 320, 321, 324, 331,
344, 349, 351, 352, 353, 354,
355, 362, 363, 365, 370, 371,
375, 378, 387, 442, 443, 447,
460, 461, 478, 479, 480, 491,
492, 524, 532, 533, 535, 544,
547
- eksistensi 31, 34, 41, 43, 92, 165, 179,
312, 324, 369, 396, 514
- e-public 331
- era digital 499, 500
- Evaluasi 230, 236, 452, 455, 457, 458,
461, 465, 469, 473, 539
- e-voting 331
- E-Waste xviii, 451, 462, 463, 465,
466, 467, 469, 472
- F**
- fenomena xiii, 88, 94, 121, 128, 184,
196, 197, 208, 217, 218, 219,
220, 238, 240, 241, 266, 280,
281, 282, 293, 294, 299, 300,
301, 308, 318, 331, 332, 333,
334, 336, 341, 345, 356, 383,
508
- G**
- Gender v, 184, 199, 277, 351, 357,
358, 363, 364, 366
- gerakan 178, 227, 228, 230, 231, 233,
235, 236, 237, 238, 239, 241,
242, 243, 248, 249, 310, 313,
314, 367, 368, 372, 373, 376,
378, 379, 388, 390, 395, 474,
475
- Good governance 63
- Governance v, 45, 64, 81, 83, 84, 85,
86, 113, 118, 162, 165, 174,
182, 239, 244, 482, 501, 522,
545
- H**
- Hak Asasi Manusia x, 281

I

- identifikasi 11, 151, 241, 243, 465, 495, 506
Implementasi 45, 81, 110, 117, 147, 155, 161, 169, 170, 318, 324, 325, 359, 365, 483
infografis 404, 541
Inovasi i, iii, v, vii, 26, 32, 33, 42, 43, 116, 124, 346, 449

K

- kapabilitas 452, 457, 464, 469
kebijakan publik 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 180, 185, 331, 335, 336
kesejahteraan sosial 322, 350
kesenjangan digital 331, 337, 338, 339, 344, 346
ketimpangan 23, 107, 193, 323, 344, 350, 524
Kolaborasi 44, 47, 50, 77, 79, 122, 130, 131, 135, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 155, 157, 161, 182, 239, 545
komprehensif viii, 53, 169, 174, 181, 369, 395, 486
komunikasi pemerintahan 201, 202, 203, 204, 206, 207, 212, 213, 215, 216, 220, 221
komunikator 202, 203, 204, 205, 206, 207, 217, 409, 410
konsepsi 164, 165, 173, 175, 178, 179, 180, 181, 316, 333
konten 403, 404, 405, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 430
kontestasi 164, 165, 166, 167, 168, 170, 226, 315, 386
korupsi 228, 236, 237, 243, 287, 296, 303, 367, 368, 377, 396, 400, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546,

547, 548

- krisis v, 53, 61, 66, 67, 70, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 110, 111, 143, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 248, 350, 375, 433, 434, 438, 441, 442, 444, 447, 505, 523, 526, 532, 533, 543

L

- Liberalisasi 227, 367
lingkungan 23, 26, 30, 35, 49, 59, 60, 62, 64, 69, 77, 78, 88, 105, 106, 135, 141, 149, 151, 158, 196, 197, 208, 217, 218, 219, 220, 343, 344, 345, 353, 361, 362, 410, 418, 451, 452, 453, 454, 459, 460, 461, 462, 467, 469, 475, 476, 478, 479, 491, 492, 499
Literasi digital 337, 343, 344

M

- masyarakat vi, 8, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 90, 91, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 122, 123, 125, 126, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 194, 197, 198, 202, 203, 204, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 219,

220, 226, 227, 228, 231, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 243,
248, 253, 255, 266, 274, 280,
281, 286, 288, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 309, 312, 314,
317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 331, 332, 333, 334, 335,
336, 338, 339, 340, 341, 342,
344, 345, 346, 347, 349, 352,
353, 358, 359, 360, 361, 362,
363, 367, 368, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 376, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 384,
385, 386, 395, 396, 402, 403,
404, 405, 408, 409, 410, 412,
413, 415, 416, 418, 419, 420,
421, 423, 424, 429, 434, 435,
436, 440, 442, 443, 444, 445,
446, 452, 453, 454, 459, 460,
461, 462, 463, 464, 465, 466,
467, 468, 469, 470, 471, 474,
475, 476, 477, 478, 479, 480,
485, 486, 487, 488, 489, 490,
491, 492, 493, 494, 495, 496,
497, 499, 500, 505, 506, 509,
510, 511, 518, 519, 523, 524,
527, 530, 532, 541, 542, 543
media baru 330, 411
media sosial 99, 104, 124, 134, 136,
190, 202, 210, 213, 220, 227,
231, 233, 243, 248, 298, 309,
331, 332, 340, 344, 404, 464,
485, 489, 495, 497, 498, 499,
500, 504, 506, 507, 508, 513,
514, 517, 519
mobilisasi sumber daya 178

N

netizen v, 226, 227, 230, 233, 234,
235, 333
Nvivo 12 plus 230, 330

O

opini v, 146, 158, 299, 318, 365, 398,

504, 505, 506, 507, 508, 509,
510, 511, 512, 513, 515, 516,
517, 518, 519, 520, 548
organisasi 3, 6, 15, 18, 19, 26, 28, 34,
38, 43, 61, 62, 91, 92, 94, 136,
149, 156, 178, 208, 209, 211,
213, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 283, 285, 288, 294, 319,
334, 341, 345, 346, 368, 377,
380, 385, 386, 387, 388, 389,
395, 396, 406, 407, 408, 409,
415, 456, 460, 478, 498, 542
otonomi daerah 369

P

Pandemi v, vii, 11, 15, 20, 21, 37, 43,
44, 45, 47, 50, 55, 57, 64, 70,
72, 74, 81, 82, 88, 94, 98, 100,
108, 109, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 124, 138, 143, 171,
174, 177, 178, 181, 182, 201,
202, 203, 204, 211, 212, 214,
221, 222, 223, 291, 302, 306,
330, 336, 348, 350, 351, 352,
353, 357, 363, 364, 366, 402,
403, 425, 430, 440, 442, 443,
447, 448, 449, 450, 476, 481,
482, 486, 521, 523, 524, 527,
531, 532, 537, 544, 545, 546,
547
pariwisata 24, 39, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 102, 125, 129, 130, 137,
203, 314, 324, 376
partisipasi 28, 42, 126, 152, 178, 202,
210, 220, 227, 254, 283, 284,
307, 309, 315, 317, 318, 321,
331, 332, 334, 335, 337, 341,
355, 409, 441, 446, 475, 477,
496, 499, 506, 508, 514, 519,
541, 543

pelayanan 27, 47, 49, 58, 59, 64, 79, 91, 124, 207, 336, 403, 409, 410, 413, 416, 442, 447, 458, 460, 461, 491, 492, 498

pemerintahan vi, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 54, 63, 87, 93, 95, 97, 99, 130, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 172, 180, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 283, 284, 287, 292, 305, 307, 309, 310, 315, 316, 318, 325, 326, 331, 334, 335, 345, 352, 368, 369, 370, 377, 379, 380, 384, 408, 409, 413, 432, 433, 434, 438, 441, 442, 445, 454, 460, 491, 492, 499, 531, 543

pemimpin 14, 95, 178, 212, 266, 316, 341, 375, 377, 383, 459

pentahelix 122, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 144, 145, 146, 153, 155, 156, 160, 161

penyelenggara 226, 242, 247, 250, 251, 253, 254, 259, 260, 265, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 286

perempuan 153, 183, 185, 186, 195, 198, 303, 323, 324, 333, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 362, 363, 364, 531

Pilkada x, xiv, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 273

R

relasi 6, 164, 167, 168, 171, 174, 175, 178, 180, 193, 254, 349, 350, 369, 486

relevansi 164, 444, 505, 507, 512, 515

represifitas digital 331, 337, 338, 341

reputasi 53, 211, 218, 219, 408

respon v, 50, 61, 76, 97, 100, 104, 184, 226, 227, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 240, 243, 281, 332, 333, 345, 378, 432, 435, 464, 468, 470, 485, 486, 487, 490, 495, 497, 498, 499, 500, 506, 507, 517, 528

S

sentimen 231, 376, 509, 511, 512, 515

smart environment 451, 453, 454, 456

sosialisasi 76, 80, 100, 110, 145, 158, 215, 253, 402, 404, 405, 415, 416, 418, 422, 423, 424, 429, 430, 434, 445, 470

strategi 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 38, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 70, 77, 90, 92, 93, 104, 109, 110, 111, 124, 126, 130, 133, 134, 151, 153, 202, 209, 211, 212, 213, 216, 220, 243, 322, 324, 403, 404, 407, 413, 420, 457, 474, 543

Sumber Daya 84, 85, 473

surat suara xiv, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274

sustainability 49, 456

swasta 18, 56, 74, 75, 76, 78, 91, 92, 93, 126, 127, 128, 131, 133, 135, 140, 149, 164, 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 239, 240, 289, 324, 346, 362, 529

T

tata kelola v, 40, 41, 50, 53, 54, 57, 64, 67, 78, 87, 93, 95, 165, 166, 180, 215, 216, 255, 305, 325, 362, 434, 540

teknologi 54, 55, 57, 74, 76, 78, 80,

110, 124, 134, 142, 319, 320,
330, 331, 332, 333, 334, 338,
339, 340, 343, 344, 345, 346,
413, 421, 444, 451, 452, 453,
460, 461, 467, 469, 470, 479,
486, 487, 488, 489, 492, 496,
499, 513

Tipologi 7

Twitter 333, 344, 485, 486, 490, 495,
497, 498, 499, 505, 506, 514,
520, 522

V

varian xiv, 32, 102, 106, 179, 247,
250, 251, 256, 257, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 269, 270, 271, 274,
381

W

Website iv, xiv, 81, 400, 403, 404, 412,
413, 418, 419, 422, 424, 429,
430, 521

BIOGRAFI

Dian Eka Rahmawati merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian gender dan politik, civil society, dan komunikasi pemerintahan. Lahir di Kediri, 27 Desember 1974, gelar sarjana diperoleh dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada tahun 1998, pada tahun 2000 mendapatkan gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor didapat dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Civil Society, Komunikasi Pemerintah dan Metode Penelitian Sosial. Berbagai buku serta publikasi di jurnal nasional dan internasional telah dihasilkan sesuai dengan bidang penelitian dan kompetensinya.

David Efendi merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan area spesialisasi politik lokal, gerakan sosial, *critical discourse analysis*, dan politik ekologi. Gelar *Master of Art* didapatkan dari Universitas Gadjah Mada dan Master kedua dari Universitas Hawaii, Amerika Serikat. Karya telah diterbitkan oleh PolGov UGM pada tahun 2010 dengan judul *The Decline of Bourgeoisie: Runtuhnya Pedagang pribumi Kotagede, buku Muhammadiyah dan Pilpres, Kajian Civil Society*. Buku lain telah diterbitkan adalah *matinya kota, opposing liberal democracy, kampung hijau*, dan beberapa lainnya. Penulis mengeditori beberapa buku dan menulis buku serta mempublikasi hasil riset di jurnal-jurnal bereputasi. Penulis sedang menyelesaikan program

Doktoral Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada. Aktifitas di luar kampus menjadi tanaga ahli Bappeda DIY, Staf Ahli DPD RI DIY, Tim asistensi keistimewaan DIY, sebagai pengurus PP Muhammadiyah, Menjadi Ketua Serikat Taman Pustaka, Direktur riset di PSM UMY, Ketua riset di LSN, dan Peneliti LP3M UMY.

Awang Darumurti merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian tata kelola pemerintahan kolaboratif. Lahir di Yogyakarta 19 Oktober 1981. Gelar sarjanah di dapat di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005, gelar Master di dapat di Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tahun 2007, pada saat ini sedang melanjutkan Program Doktor di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada.

Tri Sulistyaningsih merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang dengan spesialisasi penelitian Urban Planing dan Tata Kota. Beliau mendapatkan gelar Doktor di dapatkan dari Universitas Brawijaya. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Tata Kota dan Urban Planing.

Ridho Al-Hamdi adalah Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan konsentrasi keilmuan ilmu politik terutama terkait isu partai politik, pemilu, demokrasi serta Islam dan politik. Sejak Februari 2018 hingga buku ini terbit, dia adalah direktur *International Program of Government Affairs and Administration* (IGOV) UMY. Pendidikan doktor di bidang ilmu politik diselesaikan di Universitas TU Dortmund, Jerman (beasiswa BPPLN Kemenristekdikti RI, 2014-2017). Pendidikan sarjana

dan masternya ditamatkan di UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gadjah Mada. Sebelum ke jenjang universitas, dia pernah menjadi santri di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada *Spring Season* 2018, dia pernah menjadi dosen tamu di Universitas Pompeu Fabra, Barcelona, Spanyol atas sponsor Erasmus+ dan *adjunct assistant professor* di Asia University, Taiwan (collaborative grant, 2018). Sejumlah buku pernah ditulisnya, di antaranya *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Graha Ilmu, 2013), *Indonesian Political Ideology: Political Parties and Local Governance in Yogyakarta Municipality 1998-2015* (Tectum, 2017), *Islam dan Politik di Indonesia: Pemikiran Muslim Modernis Pasca Orde Baru* (Calpulis, 2018), *Epistemologi Oksidentalisme: Membongkar Mitos Superioritas Barat, Membangun Kesetaraan Peradaban* (Samudra Biru, 2019), *Teknik Alokasi Suara Menjadi Kursi di Parlemen* (Lab IP UMY, 2019), *Pemilu 2019 di Mata Milenial: Catatan dari Bilik Suara 17 April 2019* (Lab IP UMY & Samudra Biru, sebagai editor, 2020), *Paradigma Politik Muhammadiyah: Epistemologi Berpikir dan Bertindak Kaum Reformis* (IRCISOD, 2020), dan *Ambang Batas Pemilu: Pertarungan antar Partai Politik dan Pudarnya Ideologi di Indonesia* (UMY Press, 2020). Aktif juga menulis artikel ilmiah di berbagai jurnal nasional maupun internasional yang bisa diakses online serta opini di sejumlah koran harian. Untuk berkomunikasi, bisa melalui e-mail: ridhoalhamdi@umy.ac.id atau bisa dijumpai di <https://ridhoalhamdi.id>.

Muchamad Zaenuri lahir di Kendal, 28 Agustus 1966. Pendidikan SD sampai dengan SMA diselesaikan di Kendal Jawa Tengah. Menamatkan pendidikan SD Pegulon 1 Kendal pada tahun 1979, SMP Negeri 2 Kendal pada tahun 1982 dan SMA Negeri Kendal pada tahun 1985. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas kemudian menempuh program S.1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan lulus tahun 1991, kemudian melanjutkan di Program S.2 Administrasi Publik UGM dan lulus tahun 2003. Pada tahun 2016 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi

Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Sejak tahun 1994 hingga sekarang menjadi dosen tetap di UMY. Disamping menjadi dosen tetap di UMY, sejak tahun 2014 hingga sekarang menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Konsultan Indonesia (DPD Perkindo) DIY, dan sejak tahun 2017 hingga sekarang menjadi Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY. Mengajar mata kuliah Tata Kelola SDM Pemerintahan, Tata Kelola Bencana dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Buku yang pernah ditulis antara lain: *Perencanaan Strategis Kepariwisata Daerah*, *Manajemen SDM Pemerintahan* dan *Tata Kelola Pariwisata-Bencana Berbasis Collaborative Governance*.

Rahmawati Husein merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Tata Kelola Bencana dan Local Government. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dan Doktor di raih di Amerika Serikat. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Tata Kelola Bencana dan Penelitian Kuantitatif.

Sanny Nofrima merupakan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar Sarjana (S1) di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019 dan gelar Master (S2) di dapat dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan tahun 2021. Saat ini penulis menjadi Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain penulis juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Bambang Eka Cahya Widodo merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi Pemilu dan Partai Politik. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Studi Demokrasi dan Tata Kelola Pemilu.

Juhari Sasmita Aji merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Tata Kelola Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Proses Legislasi, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan.

Suswanta merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Tata Kelola Pemerintah Desa, Politik Islam. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor di dapat dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Tata Kelola Pemerintah Desa dan Penelitian Kualitatif.

Muhammad Sokarno merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama menjadi mahasiswa aktif mengikuti kegiatan baik

regional, nasional maupun internasional, selain itu juga aktif untuk menulis dan dipublikasikan.

Aprilianto Satria Pratama merupakan Mahasiswa Program Master di Universitas Gadjah Mada. Selain itu penulis juga aktif dalam melakukan publikasi di media online.

Bachtiar Dwi Kurniawan merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Kepemimpinan dan Civil Society. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, gelar Master dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Kepemimpinan Pemerintahan, Tata Kelola Informasi Pemerintahan.

Ummiy Zakiya merupakan Dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Gelar sarjana di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gelar Master di raih di Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu beliau juga Aktif dalam publikasi di jurnal maupun prosiding nasional dan internasional.

Muhammad Eko Atmojo merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan fokus kajian penelitian tata kelola sumber daya manusia, kebijakan public, merit system, netralitas birokrasi dan politisasi birokrasi. Gelar Sarjanah (S1) Ilmu Pemerintahan didapat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2013, sedangkan untuk Gelar Master (S2) Ilmu Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2015. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan penulis mengampu Mata

Kuliah sebagai berikut: Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan, Birokrasi Pemerintahan, Studi Konstitusi dan Lembaga Negara, dan Bahasa Indonesia (Penulisan Karya Ilmiah). Penulis aktif melakukan penelitian setiap tahunnya diantaranya adalah sebagai berikut: *Mekanisme Pengisian Pejabat Struktural Eselon II Melalui Lelang Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bantul Tahun 2017-2018*, *Analisis #JagaASN sebagai Media Kampanye Netralitas Birokrasi di Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*. Selain itu beliau juga aktif menulis artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional, serta menjadi Reviewer Jurnal Nasional Terakreditasi di berbagai Universitas di Indonesia.

Tunjung Sulaksono merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Partai Politik dan Gerakan Sosial. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor di dapat dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Studi Partai Politik, Tata Kelola Pemilu.

Herdin Arie Saputra merupakan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar Sarjana (S1) di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gelar Master (S2) di dapat dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Penulis mempunyai pengalaman menjadi Asisten Riset, Asisten Peneliti Lembaga Strategi Nasional dan mengikut beberapa konferensi Internasional. Di samping itu beberapa tulisan beliau telah diterbitkan jurnal nasional dan internasional.

M. Daimul Abror merupakan Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Kadiri dengan spesialisasi penelitian Pemerintahan Daerah Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah, Kebijakan Publik. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Airlangga pada tahun 2008, gelar Master dari Universitas Mardeka Malang pada tahun 2011 dan gelar Doktor Universitas Brawijaya pada tahun 2017. Selama mengajar di Program Studi Administrasi Publik mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Pelayanan Publik, Kebijakan public.

Rossi Maunofa Widayat merupakan Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram dengan spesialisasi penelitian Media Sosial dan Politik. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, gelar Master dari Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor di dapat dari Program Studi Ilmu Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama mengajar di Program Studi Administrasi Publik mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, Birokrasi Indonesia dan Manajemen Pelayanan Publik.

M. Lutfie Khoiri merupakan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ganapati Sjastru Satyani merupakan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Kendal Bidang Teknologi Informasi, ganapati.satyani5@gmail.com.

Fauzan A Sandiah merupakan Pegiat dari Rumah Baca Komunitas, penulis telah mendapatkan gelar sarjana dan magister dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan di Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan LHKP PP Muhammadiyah.

PUBLISHED BY
SAMUDRA PAPERU

Prawirayudha Pratama merupakan Alumni Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mendapatkan gelar sarjana di Universitas Mulawarman. Saat ini beliau merupakan Saat ini penulis menjadi Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman. Selain penulis juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional dan internasional.

Bachtiar Dwi Kurniawan merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Politik dan Kebijakan Publik. Gelar sarjana di dapat dari UIN Sunan Kalijaga, gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Penulis sedang menyelesaikan program Doktoral Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada. Selama mengajar di Program Studi Administrasi Publik mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Sosiologi Pemerintah, Ekonomi Politik Pemerintahan dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan.

Utami Nur merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama menjadi mahasiswa aktif mengikuti kegiatan baik regional, nasional maupun internasional, selain itu juga aktif untuk menulis dan dipublikasikan

Tatryana Rendi Ziar Zhafira merupakan salah satu alumni dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang saat ini menjadi salah satu asisten peneliti di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus menjadi mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lahir di Jakarta 28 September 1999, serta sekaligus alumni dari Program

Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2017.

Tiara Khariunnisa merupakan salah satu mahasiswa Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan program studi Ilmu Pemerintahan. Gelar Strata satu di dapat pada tahun 2021 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan program studi Ilmu Pemerintahan. Penulis lahir 16 Januari 2000 di Samarinda, Kalimantan Timur, serta memiliki minat dalam bidang penulisan ilmiah sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya.

Helen Dian Fridayani merupakan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar Sarjana di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gelar Master di dapat dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan tahun. Sekarang penulis sedang menyelesaikan pendidikan doctor pada Program Studi Ekonomi Politik, Universitas Nasional Cheng Kung (NCKU), Taiwan dan sebagai Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Vindhi Putri Pratiwi merupakan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar Sarjana di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019 dan gelar Master di dapat dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan tahun 2021. Saat ini penulis menjadi Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain penulis juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional dan internasional.

PUBLISHER
SAMUDRA PERU

Suswanta merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Tata Kelola Pemerintah Desa, Politik Islam. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada dan gelar Doktor di dapat dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Tata Kelola Pemerintah Desa dan Penelitian Kualitatif.

Moch Edward Trias Pahlevi merupakan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar Sarjana di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gelar Master di dapat dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Saat ini penulis menjadi Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain penulis juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional. Saat ini penulis sebagai Koordinator Komite Independen Sadar Pemilu.

Sakir merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Tata Kelola Bencana dan Keuangan Publik. Adapun gelar sarjana di dapat dari Program Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013, pada tahun 2015 mendapatkan gelar Master dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, dan Monitoring Evaluasi Kinerja Pemerintah.

Titin Purwaningsih merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Politik Dinasti, dan Gender. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor di dapat dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Proses Legislasi dan Studi Partai Politik.

Azka Abdi Amr Robbins merupakan Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar Sarjana di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gelar Master di dapat dari Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis menjadi Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Peneliti di Komite Independen Sadar Pemilu.

Fajar Apriani merupakan Dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Mulawarman dengan spesialisasi penelitian *Public Administration, Public Policy and Gender*. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Mulawarman, gelar Master dari Universitas Mulawarman dan Gelar Doktor dari Universitas Hasanuddin. Selama mengajar di Program Studi Administrasi Publik mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Kebijakan public, Keuangan negara dan Administrasi keuangan negara dan daerah.

Reazha Nur Oktavianti merupakan Alumni Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yeni Rosilawati merupakan Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian *CSR, Public Relations and Organizational Development*. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan gelar PhD dari *University Sains Malaysia*. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Strategi dan taktik public relations, komunikasi organisasi dan pengantar public relations.

Misran merupakan mahasiswa program studi magister ilmu pemerintahan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan spesialisasi penelitian komunikasi pemerintahan, dan kebijakan public. Gelar sarjana di dapat dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) dan saat ini sedang melanjutkan studi master di universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Lantip Fajar Utomo merupakan Temporary Staff Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga merupakan alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama menjadi mahasiswa aktif mengikuti kegiatan baik di kampus maupun di luar lingkungan kampus. Semasa kuliah melakukan penelitian yang berfokus pada gerakan sosial dan ketahanan pangan.

Husni Amriyanto merupakan Dosen di Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sedang menyelesaikan Program Doktor Politik Islam di UMY.

Bubu Alim Swarga atau kerap disapa Bubu merupakan seorang peneliti di Pusat Studi Muhammadiyah (PSM). Pria asal Sulawesi Selatan ini memiliki fokus penelitian pada Politik Lokal, Kebijakan Publik, Perbandingan Politik dan Politik Internasional di Asia

Pasifik. Setelah menyelesaikan studi S1 di Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ia melanjutkan S2 Studi Asia Pasifik di Thammasat University, Thailand dengan mendapatkan full beasiswa Thai Royal Government Scholarship dari Pemerintah Thailand.

Melania Novitasari merupakan mahasiswa Progtam Study Administrasi Publik, Semester 6 di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Lahir di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Yogyakarta, 4 Januari 2000. Ia juga bergabung dalam Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tulisan ini berangkat dari keresahan masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di lingkup perguruan tinggi.

Eli Kardilla merupakan mahasiswa Administrasi Publik semester 6 Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Lahir di Berau, 06 November 2000. Ia merupakan mahasiswa yang aktif di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tulisan ini berangkat dari keresahannya terkait sistem pencegahan dan penanganan kejahatan seksual yang terkesan tidak pro kepada korban. Maka dari itu tulisan ini hadir berangkat dari urgensi Permendikbud No. 30 yang perlu disahkan dan disempurnakan untuk menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman dan nyaman.

Buku *Demokrasi dan Civil Society: Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia* ini mewadahi empat bab pembahasan. Pada bab pertama diberikan judul *Governance, Krisis, dan Inovasi di Masa Pandemi Covid-19* memuat sembilan artikel yang sebagian disatukan oleh gagasan tentang tata kelola atau kolaborasi dan beragam model inovasi serta sebagian ditulis dalam konteks respons atas krisis yang terjadi baik bencana alam atau bencana pandemi yang sejatinya tak dapat dipisahkan dari kondisi ekologi secara holistik.

Pada bab kedua disematkan judul *Politik Elektoral di Masa Pandemi Covid-19* memuat dua tulisan yang sangat monumental perihal praktik demokrasi elektoral dan evaluasi pemilihan yang terdiri dari tulisan Bambang Eka dan Edward Trias P. yang mengoreksi praktik desa anti-politik uang perspektif netizen dengan mendayagunakan kecanggihan mesin pelacak opini media. Sementara Ridho Al-Hamdi dan Sakir menganalisis faktor penyebab suara tidak sah dalam pilkada serentak di era pandemik khususnya di Kabupaten Sleman.

Bab ketiga menghadirkan lima buah tulisan dikerangkai dalam judul bab *Demokrasi dan Gender di Masa Pandemi Covid-19*. Demokrasi yang dibaca secara langsung dan menggunakan mesin digital atau mengobservasi keragaman dinamika demokrasi di ruang-ruang *cyber politics*, juga pembacaan dalam konteks politik lokal di era desentralisasi sangat menarik karena keragaman situasi politik lokal.

Terakhir adalah Bab 4 terdiri dari tujuh artikel yang mendiskusikan peran masyarakat sipil, kekuatan-kekuatan demokratis, dan arus informasi komunikasi di saat pandemi yang mengisyaratkan bahwa diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas kekuatan, dan gagasan demokratisasi informasi untuk mendapatkan ketangguhan masyarakat dan tata pemerintahan yang partisipatif.